

MAKRO

BURSA & FINANSIAL

Menkes : Indonesia Sudah Dapat 360 Juta Dosis Vaksin Covid

NERACA

Jakarta – Menteri Kesehatan RI Budi Sadikin Gunadi menyatakan Indonesia sudah mendapatkan 360 juta lebih dosis vaksinasi sebagai upaya mencegah penularan COVID-19 di Tanah Air. "Alhamdulillah kita bisa dapat dosis vaksinasi untuk 181,5 juta rakyat Indonesia. Karena satu orang dua dosis maka 360 juta lebih dosis sudah didapat," ujarnya di sela memantau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 untuk ratusan kiai di Kantor Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur, sebagaimana dikutip Antara, kemarin.

Budi menjelaskan vaksinasi di dunia diharapkan dapat mencapai 70 persen kekebalan komunal dari jumlah 7,8 miliar manusia, atau artinya ada 5,5 miliar dosis atau sekitar 11 miliar dosis yang sangat dibutuhkan dengan cepat. Terdapat empat jenis vaksin yang diperoleh Indonesia, yaitu Sinovac, AstraZeneca, Novovac, dan Pfizer dan diharapkan tuntas pelaksanaan vaksinasinya dalam kurun waktu 12 bulan.

"Kapasitas produksi vaksin di dunia sekitar 3-4 miliar. Jadi, ketika dapat maka tidak bisa memilih, sebab istilahnya kita rebutan seluruh dunia," ucapnya. Sementara pada pelaksanaan vaksinasi, Menkes Budi menyaksikan suntikan dosis kedua menggunakan vaksin berjenis Sinovac kepada KH Anwar Mansur, KH Agoes Ali Masyhuri, KH Anwar Iskandar dan KH Abdul Matin.

Setelah itu, dilakukan vaksinasi dosis pertama menggunakan vaksin AstraZeneca kepada kiai muda, antara lain KH Muhammad Muslih, KH Jazuli Soleh Chosim, KH Ainul Mubarrak, KH Lukmanul Hakim seratarusan kiai lainnya. "Dengan kiai PWNU Jatim berkeinginan divaksin, maka diharapkan bisa membangkitkan keyakinan masyarakat berkenan memakai vaksin ini yang dipastikan aman," tuturnya. ● bari

Pemerintah Tetapkan Penjualan SR014 Sebesar Rp16,7 Triliun

NERACA

Jakarta – Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan menetapkan penjualan sukuk ritel seri SR014 sebesar Rp16,7 triliun dengan menjangkau 35.626 orang di seluruh provinsi di Indonesia. "Jumlah investor SR014 sebanyak 35.626 orang merupakan yang terbesar ketiga sepanjang penerbitan SBSN Ritel setelah SR008 dan SR013," demikian kutipan dari keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Selasa (23/3).

Hasil penjualan SR014 yang mencapai Rp16,7 triliun ini oversubscribed sebesar 1,67 kali dari target penerbitan sebesar Rp10 triliun di tengah kondisi pasar keuangan yang belum stabil. Rata-rata pemesanan SR014 yang memiliki kupon terendah sepanjang sejarah penerbitan SBN ritel yakni 5,47 persen ini adalah sebesar Rp468,90 juta.

DJPPR mencatatkan investor generasi Y atau milenial yang membeli SR014 adalah sebanyak 12.968 orang atau 36,4 persen dari total investor dengan nominal pembelian Rp3,1 triliun atau 18,56 persen dari total penjualan. Sementara itu pembelian SR014 oleh investor generasi Z tercatat dilakukan oleh 331 orang yang merupakan 0,93 persen dari total investor dengan nominal sebesar Rp1.19,44 miliar atau 0,71 persen dari total penjualan. ● bari



NERACA/Infarfoto/Rivan Awal Lingga/ra

DEFISIT APBN FEBUARI | Penjual kopi melintas kawasan gedung bertingkat di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Selasa (23/3/21). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan defisit APBN pada bulan Februari 2021 Rp63,6 triliun atau mencapai 0,36 persen terhadap PDB.

Perlindungan Data Dukung Pencapaian Pertumbuhan Ekonomi Digital

Jakarta – Pertumbuhan ekonomi digital Indonesia berpotensi terus meningkat. Salah satu faktor yang mendukung hal ini adalah pandemi Covid-19. Pandemi seakan mempercepat proses transformasi ekonomi digital karena berubahnya kebiasaan masyarakat dalam bertransaksi dan berbelanja.

■ NERACA

Namun pertumbuhan tersebut harus dibarengi dengan perlindungan kerahasiaan data pribadi. Sebuah survei oleh Mastel dan APJII pada 2017 menemukan bahwa 79% responden di Indonesia keberatan ketika data pribadi mereka dipindahkan tanpa izin dan 98% mendukung pengesahan UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Akan tetapi pada praktiknya, konsumen Indonesia seperti halnya tidak terlalu mengkhawatirkan penggunaan data pribadi mereka.

iliki oleh semua orang tanpa terkecuali, kerahasiaan data pribadi memberikan kuasa bagi para individu untuk menentukan penggunaan data pribadi mereka. Pemilik data memiliki hak untuk mengizinkan pengelola data memproses dan menggunakan data mereka. EU GDPR 2016/679 mengatur bahwa hanya data yang memadai dan relevan yang dapat diproses oleh pengelola data, sementara itu jumlah datanya harus dibatasi sesuai dengan apa yang dibutuhkan untuk tujuan yang telah disetujui oleh pemilik data.

Sebuah studi oleh Reynaldi & Tidana pada 2020 menemukan bahwa pengguna tidak mempelajari atau memahami kebijakan kerahasiaan perusahaan yang jasanya mereka gunakan, termasuk bagian syarat dan kondisi yang berhubungan dengan pen-

gunaan data pribadi mereka. Di saat perusahaan-perusahaan Eropayang beroperasi di Indonesia patuh kepada aturan European Union General Data Protection Regulation (EU GDPR), karena di dalamnya juga diatur terkait kegiatan perusahaan Eropa di luar wilayah Uni Eropa, banyak perusahaan Indonesia tidak mengutarakan perlindungan data pribadi dalam kebijakan dan prosedur mereka dengan benar. Kebanyakan dari mereka juga memiliki pemahaman yang kurang akan konsep kerahasiaan data dan perlindungan data konsumen.

"Hal ini sangat disayangkan. Agar menarik bagi investor, ekonomi digital Indonesia idealnya sudah menerapkan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi yang memadai dan mengkomodifikasi kepentingan semua stakeholders. ● bari

Pemerintah Pastikan Penerbitan SBN Dilakukan Secara Prudent

NERACA

Jakarta – Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara memastikan pengelolaan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) untuk pembiayaan di 2021 akan dilakukan secara prudent dan berhati-hati. "Pengelolaan SBN akan dilakukan se-prudent mungkin. Kita betul-betul memperhatikan pasar dan mencari titik-titik masuk ke pasar yang baik," kata Suhasil dalam jumpa pers virtual APBN di Jakarta, Selasa (23/3).

Ia memastikan penerbitan SBN ini akan mempertimbangkan kebutuhan pendanaan APBN dan investor yang memadai agar tidak berdampak terlalu dalam dengan ketidakpastian pasar keuangan global. Sebelumnya, penerbitan SBN selama Februari-Maret 2021 terpengaruh oleh pemulihan ekonomi AS dan perbaikan kondisi pandemi yang mendorong kenaikan inflasi dan imbal hasil US Treasury.

Situasi itu menyebabkan kenaikan yield untuk Surat Utang Negara (SUN) rupiah dan rendahnya penawaran masuk dalam lelang SUN rutin setiap bulan karena kurangnya minat dari investor asing. "Kita punya kebutuhan defisit anggaran 5,7 persen terhadap PDB (di APBN 2021). Kalau kita ingin memenuhi pembiayaan itu, mesti smart masuk ke pasar," kata Suhasil.

Meski demikian, ia memastikan pemerintah tidak hanya fokus untuk memenuhi pembiayaan dari utang karena sumber pendanaan utama untuk APBN berasal dari pajak. Sebelumnya, realisasi pembiayaan APBN pada 2021 hingga akhir Februari telah tercatat mencapai Rp273,1 triliun atau 27,1 persen dari target defisit anggaran Rp1.006,4 triliun.

Dari pembiayaan tersebut, sebagian besar telah melalui penerbitan SBN (neto) Rp271,4 triliun atau 22,5 persen dari target Rp1.207,3 triliun. Pencapaian ini tumbuh signifikan 138,4 persen dibandingkan perodesama 2020. Kementerian Keuangan mencatat pembiayaan utang tersebut sudah relatif tinggi karena mencapai 91,5 persen dari target penerbitan pada triwulan I-2021. ● bari

Kemenkeu Siapkan Sejumlah PP dan PMK Turunan dari UU Cipta Kerja

NERACA

Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah menggarap sejumlah Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) turunan dari pelaksanaan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Saat Konferensi Pers APBN KITA secara daring di Jakarta, Selasa, Dirjen Pajak Kemenkeu Suryo Utomo mengatakan telah menerbitkan dua PP dan satu PMK terkait UU Cipta Kerja klaster pajak.

"Ada dua PP yang sudah diterbitkan, pertama pemberlakuan perpajakan untuk mendorong kemudahan berusaha yakni PP Nomor 9 Tahun 2021 dan ada PP terkait pemberlakuan perpajakan transaksi LPI, PP Nomor 49 tahun 2021," kata Suryo. Sedangkan PMK yang telah diterbitkan, lanjut Suryo, adalah PMK Nomor 18 Tahun 2021 yang mulai efektif mulai berlaku per 17 Februari 2021.

"PMK ini mengatur hal-hal yang memang didelegasikan dan perlu diatur lebih lanjut dari UU Cipta Kerja. Banyak yang dilakukan di sana banyak yang diatur di sana dan semuanya ada di satu PMK," jelasnya. Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu Askolani menyebutkan terdapat lima PP yang telah diselesaikan. ● bari



PT SEKAR LAUT Tbk DAN ENTITAS ANAK

Jl. Jenggolo II/17 Sidoarjo, Telp. (031) 892 1605 Fax. (031) 894 1244

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) KONSOLIDASIAN				
Per 31 Desember 2020 dan 2019 (Disajikan dalam Rupiah)				
	31 Des 2020	31 Des 2019	31 Des 2020	31 Des 2019
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan setara kas	71.810.853.147	22.358.640.194		
Piutang usaha				
Pihak ketiga, neto setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp9.903.231.541 pada tahun 2020 dan sebesar Rp6.349.392.012 pada tahun 2019	153.898.836.527	177.886.504.926		
Pihak berelasi	3.885.542.589	4.251.875.614		
Piutang lain-lain				
Pihak ketiga	164.433.658	227.974.720		
Pihak berelasi	758.430.842	3.977.268.531		
Persediaan, neto setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp8.287.224.110 pada tahun 2020 dan sebesar Rp7.173.887.975 pada tahun 2019	146.698.971.577	161.904.003.569		
Uang muka, bagian lancar	1.229.005.449	6.474.467.819		
Pajak dibayar di muka	-	41.189.455		
Beban dibayar di muka	1.277.146.879	1.230.322.510		
JUMLAH ASET LANCAR	379.723.220.668	378.352.247.338		
ASET TIDAK LANCAR				
Piutang pajak, bagian tidak lancar	-	1.638.615.572		
Uang muka, bagian tidak lancar	575.654.211	1.135.120.768		
Aset pajak tangguhan	23.743.069.228	25.636.357.427		
Penyertaan saham	145.890.000	145.890.000		
Investasi pada entitas asosiasi	12.507.923.614	11.455.322.479		
Aset tetap, neto setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp193.528.579.158 pada tahun 2020 dan sebesar Rp168.120.781.516 pada tahun 2019	354.930.905.744	360.346.292.384		
Uang jaminan	2.114.829.157	4.574.911.242		
Aset dalam pelaksanaan	121.549.818	7.560.786.616		
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	394.139.821.773	412.493.296.488		
JUMLAH ASET	773.863.042.440	790.845.543.826		
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Pinjaman bank jangka pendek	127.004.478.768	143.657.165.835		
Utang usaha				
Pihak ketiga	61.991.737.852	89.999.968.852		
Pihak berelasi	10.518.945.899	11.066.807.002		
Utang lain-lain				
Pihak ketiga	4.077.318.369	5.456.084.252		
Pihak berelasi	152.323.000	152.323.000		
Utang pajak	4.672.412.826	2.519.628.246		
Beban yang masih harus dibayar	20.767.474.401	18.226.521.738		
Bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo satu tahun				
Pembelian aset tetap	3.290.917.774	4.202.103.428		
Bank	12.209.022.503	12.329.364.933		
Liabilitas sewa	2.418.127.767	5.671.397.495		
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK	247.102.759.160	293.281.364.781		
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Utang jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun				
Pembelian aset tetap	1.741.323.061	2.219.127.087		
Bank	12.518.156.975	20.134.411.261		
Liabilitas sewa	2.500.346.101	4.684.420.783		
Liabilitas manfaat karyawan	103.045.886.417	90.144.271.948		
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG	119.805.712.554	117.182.231.079		
JUMLAH LIABILITAS	366.908.471.713	410.463.595.860		
EKUITAS				
Modal saham, nilai nominal Rp 100 per lembar saham pada tahun 2020 dan 2019.	69.074.050.000	69.074.050.000		
Modal dasar 2.500.000.000 saham pada tahun 2020 dan 2019. Ditempatkan dan disetor penuh 690.740.500 saham	(20.929.437.150)	(20.929.437.150)		
Tambahan modal disetor, neto	21.578.739.873	21.578.739.873		
Surplus revaluasi aset tetap	151.448.390.012	151.448.390.012		
Saldo laba dicadangkan	13.814.810.000	13.814.810.000		
Saldo laba belum dicadangkan	172.547.119.811	145.973.267.896		
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	407.533.672.546	380.959.820.631		
Keperluan non-pengendali	(579.101.819)	(577.872.665)		
JUMLAH EKUITAS	406.954.570.727	380.381.947.966		
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	394.139.821.773	412.493.296.488		
JUMLAH ASET	773.863.042.440	790.845.543.826		

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN		
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 (Disajikan dalam Rupiah)		
	31 Des 2020	31 Des 2019
PENDAPATAN NETO	1.253.700.810.596	1.281.116.255.236
BEBAN POKOK PENDAPATAN	920.111.473.686	957.200.088.005
LABA KOTOR	333.589.336.910	323.916.167.231
Beban penjualan	(146.973.540.600)	(134.870.829.144)
Beban umum dan administrasi	(111.871.841.798)	(107.805.716.652)
LABA USAHA	74.743.954.513	81.239.621.435
Pendapatan bunga	135.330.681	151.903.261
Pendapatan sewa	3.744.554.904	3.761.221.568
Beban bunga	(18.715.266.739)	(21.525.483.689)
Labas investasi pada entitas asosiasi	1.052.601.135	1.262.753.553
Rugi selisih kurs, neto	(1.170.611.572)	(686.963.074)
Labas penjualan aset tetap	269.677.084	651.613.502
Kerugian penurunan nilai piutang	(3.558.608.730)	(1.204.484.027)
Kerugian penurunan nilai persediaan	(1.676.404.176)	(7.127.011.169)
Lain-lain, neto	848.756.456	259.035.217
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN BADAN	55.673.983.557	56.782.206.578
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN BADAN		
Pajak kini	(11.470.877.440)	(14.364.651.250)
Pajak tangguhan	(1.682.859.395)	2.526.072.572
LABA PERIODE BERJALAN	42.520.246.722	44.943.627.900
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PERIODE BERJALAN		
Pos-pos yang tidak akan diklasifikasi ke laba rugi:		
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasca kerja	(6.412.198.406)	2.396.414.822
Pajak penghasilan terkait	(210.428.805)	(599.103.706)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN, SETELAH PAJAK	(6.622.627.210)	1.797.311.116
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	35.897.619.511	46.740.939.016
Labas (rugi) yang dapat diatribusikan kepada:		
Kepentingan non-pengendali	42.521.324.247	44.988.552.441
Kepentingan non-pengendali	(1.077.525)	(44.924.541)
Jumlah	42.520.246.722	44.943.627.900
Penghasilan (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	35.898.848.665	46.785.924.976
Kepentingan non-pengendali	(1.229.154)	(44.985.960)
Jumlah	35.897.619.511	46.740.939.016
LABA NETO PER SAHAM DASAR	61,83	65,42

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN		
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 (Disajikan dalam Rupiah)		
	2020	2019
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan kas dari pelanggan	1.274.164.677.275	1.266.967.166.680
Pembayaran kas kepada pemasok	(834.703.003.411)	(877.648.202.252)
Pembayaran kas kepada karyawan	(187.790.421.816)	(181.808.908.346)
Kas yang dihasilkan dari operasi	251.671.252.048	207.510.056.082
Pembayaran kas untuk beban usaha	(130.595.564.582)	(119.778.450.902)
Penerimaan kas dari pendapatan bunga	135.330.681	151.903.261
Penerimaan kas dari pendapatan sewa	6.132.623.104	3.676.577.968
Pembayaran kas untuk bunga	(18.715.266.739)	(21.525.483.689)
Penerimaan restitusi pajak	623.579.741	2.802.094.953
Pembayaran kas untuk pajak	(9.276.903.406)	(17.452.206.884)
Arus kas neto diperoleh dari aktivitas operasi	99.975.050.847	55.384.490.788
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Pembelian aset tetap	(9.660.390.943)	(37.068.726.791)
Hasil penjualan aset tetap	385.300.000	1.516.280.001
Arus kas neto digunakan untuk aktivitas investasi	(9.275.090.942)	(35.552.446.790)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan pinjaman bank	4.000.000.000	6.368.616.000
Pembayaran sewa pembiayaan dan utang pembelian aset tetap	(7.790.268.710)	(5.394.693.672)
Pembayaran pinjaman bank	(11.736.596.716)	(10.056.597.467)
Pembayaran dividen	(9.324.996.750)	(5.594.998.050)
Arus kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan	(24.851.862.176)	(14.677.673.189)
KENAIKAN NETO KAS DAN SETARA KAS	65.848.097.728	5.154.370.810
Kas dan setara kas pada awal tahun	(121.298.525.641)	(126.576.603.862)
Dampak perubahan selisih kurs	256.802.291	123.707.411
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	(55.193.625.612)	(121.298.525.641)
Kas dan setara kas terdiri dari:		
Kas dan setara kas	71.810.853.147	22.358.640.194
Pinjaman bank jangka pendek, kredit modal kerja (cerukan)	(127.004.478.768)	(143.657.165.835)
Jumlah	(55.193.625.612)	(121.298.525.641)

Catatan:

• Informasi keuangan diatas adalah laporan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, diambil dari laporan keuangan konsolidasi yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadwinata, Hidayat, Arsono, Retno, Pailligan & Rekan yang telah mengeluarkan pendapat wajar tanpa pengecualian dalam laporannya tertanggal 9 Maret 2021.

Surabaya, 24 Maret 2021

S.E. & O

Direksi PT Sekar Laut Tbk